**PROPOSAL RANCANGAN AKTUALIASI**

**“PEMBUATAN FITUR PENGINGAT PADA PROSES TELAAH LHAI DAN LHAPKKN BERBASIS EMAIL PADA DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DEPUTI BIDANG INVESTIGASI”**



DISUSUN OLEH

**YUDI PRABOWO, S.T**

**NIP : 19901221 201801 1 001**

**PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI, BOGOR**

**PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PUSDIKLAT PPMKP**

**2018**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

**RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN**

Disusun Oleh:

Yudi Prabowo, S.T

NIP. 19901221 201801 1 001

Telah diuji di depan Penguji

Pada tanggal 10 Maret 2018

Mentor Pembimbing

Constantianus Christiadji, Ak., M.Si. Ir. Rhodiyah, MM

NIP. 19711117 199202 1 001 NIP. 19560127 198303 2 002

Penguji

Ir. Sumarni, M.Pd

NIP. 19560805 198403 2 002

# **KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah mengijinkan penulis menyelesaikan penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala BPKP, Bapak Dr. Ardan Adiperdana, Ak, MBA, CA, CFrA dan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertanian, Bapak Ir. Heri Suliyanto, MBA yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS di PPMKP. Kepada pembimbing saya, Ibu Ir. Rhodiyah, MM dan mentor saya Bapak Constantianus Christiadji, Ak., M.Si., dengan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Orang Tua, para Widyaiswara, para Panitia, dan teman-teman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Non Kementerian Pertanian Tahun 2018 atas motivasi dan bantuannya sehingga rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan..

Penulis menyadari bahwa penulis tidak luput dari salah dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan saran agar laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bogor, 8 Maret 2018

Penulis

Yudi Prabowo, S.T

NIP. 19901221 201801 1 001

# **DAFTAR ISI**

[**LEMBAR PENGESAHAN** ii](#_Toc508049023)

[**KATA PENGANTAR** iii](#_Toc508049024)

[**DAFTAR ISI** iv](#_Toc508049025)

[**DAFTAR GAMBAR** vi](#_Toc508049026)

[**DAFTAR TABEL** vii](#_Toc508049027)

[**BAB I PENDAHULUAN** 1](#_Toc508049028)

[**A.** **Latar Belakang** 1](#_Toc508049029)

[**B.** **Tujuan** 2](#_Toc508049030)

[**C.** **Ruang Lingkup**](#_Toc508049031) 2

[**BAB II RANCANGAN AKTUALISASI** 3](#_Toc508049032)

[**A.** **Deskripsi Organisasi** 3](#_Toc508049033)

[**1.** **Visi** 6](#_Toc508049034)

**2. Misi** 6

[**3.** **Tugas dan Fungsi** 6](#_Toc508049034)

[**4.** **Nilai-nilai Organisasi** 8](#_Toc508049034)

[**5.** **Struktur Organisasi** 8](#_Toc508049034)

[**B.** **Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, Kedudukan Dan Peran ASN Dalam NKRI** 11](#_Toc508049033)

[**1.** **Akuntabilitas** 11](#_Toc508049034)

[**2.** **Nasionalisme** 12](#_Toc508049034)

[**3.** **Etika Publik**](#_Toc508049034) 13

[**4.** **Komitmen Mutu** 14](#_Toc508049034)

[**5.** **Anti Korupsi**](#_Toc508049034) 15

[**6.** ***Whole of Goverment***](#_Toc508049034) 15

[**7.** **Manajemen ASN**](#_Toc508049034) 15

[**8.** **Pelayanan Publik** 16](#_Toc508049034)

[**C.** **Rancangan Aktualisasi** 1](#_Toc508049036)6

[**1.** **Identifikasi Isu** 1](#_Toc508049037)6

[**2.** **Prioritas Isu (Isu yang diangkat)**](#_Toc508049038) 18

[**3.** **Pemecahan Isu**](#_Toc508049039) 19

[**4.** **Rancangan Kegiatan**](#_Toc508049040) 21

[**5.** **Penjadwalan Kegiatan** 3](#_Toc508049041)0

[**BAB III PENUTUP** 3](#_Toc508049042)1

[**DAFTAR PUSTAKA** 3](#_Toc508049043)2

[**LAMPIRAN** 3](#_Toc508049044)3

# **DAFTAR GAMBAR**

[**Gambar 2.1** – Struktur Organisasi BPKP 9](#_Toc508031923)

[**Gambar 2.2** – Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi 10](#_Toc508031924)

# **DAFTAR TABEL**

[**Tabel 2.1** Pemilihan isu melalui kriteria APKL 17](#_Toc508044256)

[**Tabel 2.2** Pemilihan isu melalui kriteria USG 18](#_Toc508044257)

[**Tabel 2.3** Gagasan pemecahan isu tapisan Mc. Namara 20](#_Toc508044258)

[**Tabel 2.4** Jadwal pelaksanaan aktualisasi dan habituasi 30](#_Toc508044259)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelayanan terbaik adalah salah satu hak dasar warga Negara yang harus terpenuhi oleh Pemerintah. Dalam konteks inilah peran ASN menjadi sangat relevan dan penting, karena ASN merupakan penyelenggara pemerintahan, yang secara otomatis menjadi penyelenggara pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah memerlukan ASN yang berkarakter, memiliki akuntabilitas, nasionalisme yang tinggi, etika publik yang luhur, memiliki komitmen mutu, dan anti korupsi.

Dalam rangka menciptakan sumber daya ASN yang memenuhi nilai-nilai tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Perbaikan pola diklat juga terus dilakukan demi menghasilkan sumber daya ASN yang terbaik untuk nusa dan bangsa.

Dalam diklat ini calon ASN diberikan materi tentang penerapan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) serta peran dan kedudukan ASN (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Wholr of Goverment dengan memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan calon ASN mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter.

* 1. **Tujuan**

Dengan adanya aktualisasi ini diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan peserta Pelatihan Dasar. Pada sisi yang lebih spesifik, diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan peran dan kedudukan ASN (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government) sehingga membentuk pribadi yang jujur, kompeten, adil, berintegritas dan profesional. Sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat da pemersatu bangsa dapat ditunjukan dengan :

1. Kemampuan memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya;
2. Kemampuan untuk mengedepankan rasa nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mampu menjunjung tinggi standar etika publik dalam melaksanakan tugas jabatannya;
4. Kemampuan untuk berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan;
5. Berani untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi;
6. Mampu untuk menjadi sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul dan selalu mengikuti perkembangan jaman;
7. Kemampuan mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik; dan
8. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peratuan bagi setiap warga negara.
   1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari aktualisasi ini yaitu pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan selama 80 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 di lingkungan tempat kerja yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika, publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelaksanaan jabatan sehari-hari.

**BAB II**

**RANCANGAN AKTUALISASI**

1. **Deskripsi Organisasi**

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: a. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; c. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah; g. evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

1. **Visi**

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

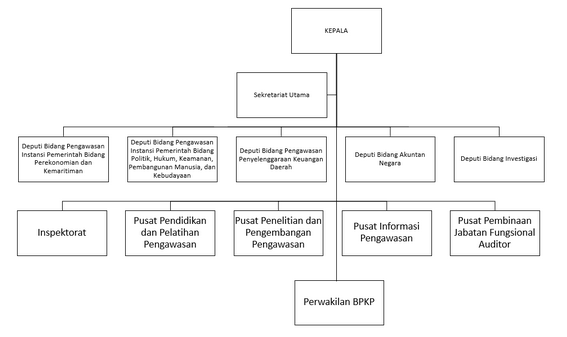
1. **Misi**
2. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif
3. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, dan
4. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
5. **Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

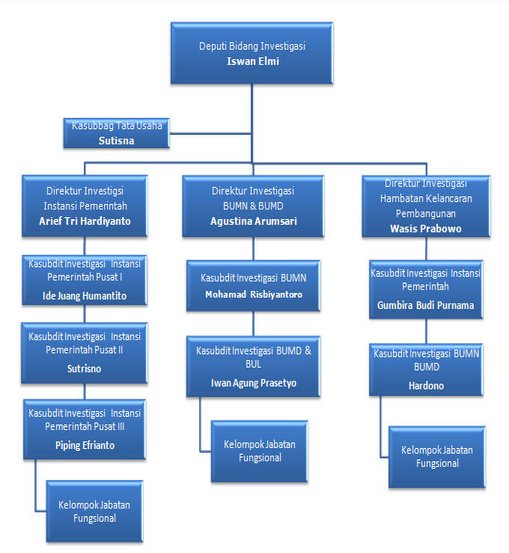
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi;
6. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
15. **Nilai-Nilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**
16. Profesional
17. Integritas
18. Orientasi Pengguna
19. Nurani dan Akal Sehat
20. Independen
21. Responsibel
22. **Struktur Organisasi**

Organisasi BPKP dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh Sekretaris Utama dan Lima Kedeputian dimana ketiganya adalah unit Eselon I. Untuk unit Eselon II terdiri dari Kantor Perwakila, Biro-Biro dan Pusat-Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi BPKP

Unit kerja tempat pelaksanaan kegiatan Aktualisasi berada di Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah yang merupakan Unit Eselon II. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah berada dibawah Unit Eselon I Deputi Bidang Investigasi, struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar 2.2



**Gambar 2.2** Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi

1. **Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, Kedudukan Dan Peran ASN Dalam NKRI**

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar ini bertujuan sebagai penguatan nilai-nilai dasar profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seluruh ASN, meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA), serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu *Whole Of Government*, Managemen ASN dan Pelayanan Publik. Berikut Nilai-nilai dasar profesi ASN, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) serta *Whole Of Government*, Managemen ASN dan Pelayanan Publik :

* + 1. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut :

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang mencangkup beberapa hal antara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*)
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability* *requires* *reporting*)
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability* *is* *meaningless* *without* *consequences*)
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability* *improves* *performance*)

Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu :

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Nilai-nilai dasar yang terkandung pada aspek akuntabilitas antara lain :

1. Jujur
2. Transparan
3. Integritas
4. Tanggungjawab (responsibilitas)
5. Keadilan
6. Kepercayaan
7. Keseimbangan
8. Kejelasan target
9. Konsisten
10. Partisipatif
    * 1. **Nasionalisme**

Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (*nation*) dengan mewujudkan satu identitas sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan Warga Negara Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila diharapkan setiap ASN memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan lebih memikirkan kepentingan publik, bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya.

Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Religius
2. Amanah
3. Disiplin
4. Non Diskriminasi
5. Saling Menghormati
6. Persamaan Derajat
7. Mencintai sesama manusia
8. Rela Berkorban
9. Menjaga Ketertiban
10. Kerja Sama
11. Cinta Tanah Air
12. Musyawarah
13. Kekeluargaan
14. Kepentingan Bersama
15. Hidup Sederhana
16. Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya.
17. Kerja Keras
18. Menghargai karya orang Lain
19. Menghormati Keputusan Bersama
20. Tenggang Rasa
    * 1. **Etika Publik**

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik.

Nilai-nilai dasar etika publik antara lain :

1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila
2. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945
3. Profesional
4. Tidak berpihak
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
6. Non diskriminatif
7. Beretika luhur
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
9. Memberikan pelayanan dengan jujur, tanggap, cepat, tepat dan akurat
10. Berdaya guna dan berhasil guna
11. Santun dalam berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerjasama
12. Transparan
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir
    * 1. **Komitmen Mutu**

Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas seseorang, maka dari itu untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain :

1. Bekerja dengan berorientasi pada mutu
2. Inovatif
3. Selalu melakukan perbaikan mutu
4. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang
5. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran
6. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal
7. Menampilkan kinerja tanpa cacat (*zerodefect*) dan tanpa pemborosan (*zerowaste*), sejak memulai setiap pekerjaan
8. Efektif dan efisien dalam bekerja
   * 1. **Anti Korupsi**

Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain :

1. Jujur
2. Peduli
3. Mandiri
4. Disiplin
5. Tanggungjawab
6. Kerja Keras
7. Sederhana
8. Berani
9. Adil
   * 1. ***Whole of government***

WOG merupakan suatu upaya dalam sistem pemerintahan yang bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

WOG juga memiliki pemahaman yakni suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas di pemerintahan.

* + 1. **Managemen ASN**

Visi UU ASN adalah mewujudkan ASN yang memiliki integritas profesional, melayani dan sejahtera. Misi UU ASN adalah memindahkan ASN dari *comfort zone* ke *competitive zone*.

Tujuan utama UU ASN antara lain :

1. Independensi dan netralitas
2. Kompetensi
3. Kinerja atau produktifitas kerja
4. Integritas
5. Kesejahteraan
6. Kualitas pelayanan publik
7. Pengawasan
   * 1. **Pelayanan publik**

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi masyarakat.

Terdapat 7 sikap pelayanan prima, yakni :

1. *Passionate* (bersemangat)
2. *Progressive* (memakain cara terbaik)
3. *Proaktive* (antisipatif, tidak menunggu)
4. *Promth* (positif, tanpa curiga)
5. *Patience* (sabar)
6. *Proporsional* (tidak mengada-ada)
7. *Functional* (tepat waktu)
8. **Rancangan Aktualisasi**
   1. **Identifikasi Isu**

Isu-isu yang ditemukan di Deputi Bidang Investigasi BPKP, antara lain sebagai berikut:

1. Cara Penggunaan Printer yang tidak optimal.
2. Kurangnya Integrasi data SIMA dan DUPAK
3. Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik.
4. Penataan ST yang kurang optimal sehingga menyulitkan dalam Pencarian.
5. Kurangnya kesadaran penggunaan aplikasi POLITe.

Dalam menganalisa isu-isu yang muncul diatas, saya akan menganalisa isu menggunakan alat penetapan isu berdasarkan APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak). Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang terjadi. Problematik artinya sebuah isu memiliki permasalahan yang kompleks sehingga butuh dicarikan solusi permasalahannya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak artinya isu yang diangkat realistis dan masuk akal untuk dipecahkan masalahnya.

**Tabel 2.1** Pemilihan Isu melalui kriteria APKL

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | Kriteria Isu | | | |
| A | P | K | L |
| 1 | Cara Penggunaan Printer yang tidak optimal | √ | √ | √ | × |
| 2 | Kurangnya Integrasi data SIMA dan DUPAK | √ | √ | √ | × |
| 3 | Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Penataan ST yang kurang optimal sehingga menyulitkan dalam Pencarian | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Kurangnya kesadaran penggunaan aplikasi POLITe | √ | √ | √ | × |

Keterangan:

A: Aktual

P : Problematik

K : Kekhalayakan

L : Layak

Berdasarkan alat bantu penetapan isu diatas dapat disimpulkan bahwa isu nomor 3 dan 4 memenuhi semua kriteria APKL. Sementara isu nomor 1, 2 dan 5 tidak memenuhi kriteria Layak.

Isu nomor 3 yaitu “Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik” memenuhi semua kriteria APKL. Isu ini Aktual karena benar-benar dan sedang terjadi bukan hanya di lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Problematik karena isu ini sudah banyak dikeluhkan oleh staf Satgas. Kekhalayakan karena staf Satgas lebih dari 1 orang dan Satgas Komputer Forensik saat ini banyak mendapatkan peran untuk mengumpulkan bukti digital. Layak karena isu ini bila dicarikan solusinya dapat lebih mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja Satgas Forensik Komputer.

Isu nomor 4 yaitu “Penataan ST yang kurang optimal sehingga menyulitkan dalam Pencarian” memenuhi semua kriteria APKL. Isu ini Aktual karena benar-benar dan sedang terjadi. Problematik karena isu ini sudah banyak dikeluhkan oleh Pegawai. Kekhalayakan karena dasar kegiatan auditor adalah ST sehingga menyangkut orang banyak. Layak karena isu ini bila dicarikan solusinya dapat lebih mengefisienkan kinerja Auidtor dan Pegawai lainnya dalam Pencarian ST.

1. **Prioritas Isu**

Berdasarkan hasil dari analisa isu menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) diatas, terdapat 2 buah isu yang memenuhi kriteria. Diantaranya yaitu:

1. Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik.
2. Penataan ST yang kurang optimal sehingga menyulitkan dalam Pencarian.

Dari kedua isu tersebut, akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan metode USG (*Urgency*, *Seriousness* dan *Growth*).

*Urgency* artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera dibahas, dianalisis dan ditindak lanjuti.

*Seriousness* artinya seberapa serius suatu isu untuk segera dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.

*Growth* adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Adapun analisis isu berdasarkan kriteria USG adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu | U | S | G | Total | Prioritas |
| 3 | Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 4 | Penataan ST yang kurang optimal sehingga menyulitkan dalam Pencarian | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 |

**Tabel 2.2** Pemilihan Isu melalui kriteria USG

Keterangan:

U : Urgency Skor 5 : sangat USG

S : Seriousness Skor 4 : USG

G : Growth Skor 3 : cukup USG

Skor 2 : kurang USG

Skor 1 : tidak USG

Berdasarkan analisis isu menggunakan metode USG diatas dapat disimpulkan bahwa isu nomor 3 mendapatkan jumlah terbesar sehingga menjadi prioritas utama yang akan dipecahkan permasalahannya..

Dilihat dari tingkat Urgency-nya, isu nomor 3 penting hal ini dikarenakan mengingat peran Satgas Forensik Komputer yang semakin penting. Isu tersebut juga berdampak serius (Seriousness) karena jika tidak segera ditangani akan mengganggu kinerja Satgas Forensik Komputer. Dari tingkat Growth, jika isu tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kesalahan yang semakin menumpuk dan semakin sulit ditangani.

1. **Pemecahan Isu**
2. **Alternatif Gagasan**

Setelah menentukan prioritas isu yang akan dipecahkan, selanjutnya adalah menganalisis gagasan pemecahan isu dengan sebelumnya melihat faktor penyebab terjadinya isu.

“Kurang optimalnya Pengelolalaan Infrastruktur dan Aset IT di satgas komputer forensik” dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Belum adanya Standar yang jelas dalam mengelola IT dan asetnya.
2. Kurangnya komitmen tiap anggota Satgas dalam mengelola aset IT dan Infrastruktur IT.
3. Tidak optimalnya dokumentasi Infrastruktur dan Aset IT yang saat ini ada.
4. Kurang rapihnya pengeloalaan aset yang ada, sehingga tempat kerja terkesan “berantakan”.

Setelah melihat faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya pengelolaan IT di satgas forensik komputer, saya memberikan gagasan penyelesaian isu sebagai berikut:

1. Membuat SOP dalam pengelolaan Infraastruktur IT dan Asetnya.
2. Optimalisasi dan Membuat SOP Pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT.

**Tabel 2.3** Gagasan Pemecahan Isu Tapisan Mc. Namara

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Alternatif Gagasan** | **Kriteria Alternatif Gagasan** | | | **Total Skor** | **Prioritas** |
| **K** | **B** | **L** |
| 1. | Membuat SOP dalam pengelolaan Infraastruktur IT dan Asetnya. | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 2. | Optimalisasi dan Membuat SOP Pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 |

Keterangan :

Skor 5 : sangat k, b, l

Skor 4 : k, b, l

Skor 3 : cukup k, b, l

Skor 2 : kurang k, b, l

Skor 1 : tidak k, b, l

1. **Prioritas Pemecahan Isu**

Berdasarkan gagasan pemecahan isu di atas, diperoleh beberapa kegiatan untuk menyelesaikan isu tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Interview Pengelola (Pihak terkait) Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik.
2. Observasi Infrastruktur dan Keadaan Aset IT saat ini.
3. Identifikasi Permasalahan yang ada saat ini mengenai Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik..
4. Melakukan pembenahan atas permasalahan yang ditemukan pada kegiatan nomor 3.
5. Membuat dokumentasi keadaan Infrastruktur dan Aset it saat ini.
6. Membuat SOP pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT saat ini.
7. **Rancangan Kegiatan**
   1. **Menghubungi Pengelola (Pihak terkait) Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik.**
      * 1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam proses permintaan izin dibutuhkan integritas dalam menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang akan dilakukan adalah mempersiapkan Surat Izin. Dimana dalam surat izin selain menerangkan rencana kegiatan dan jadwal kegiatan juga berisi permohonan **partisipasi** (Akuntabilitas) dari pihak terkait. Dalam kegiatan ini diharapkan adanya **kerja sama** (Nasionalisme) antara saya dan pihak terkait. Dalam pembuatan surat dan menghubungi pihak terkait saya akan berperilaku yang mencerminkan **beretika luhur** (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal **membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang** (Komitmen Mutu). Tentu saja isi dari Surat Izin harus **Jujur** (Anti Korupsi) tentang kegiatan apa yang akan saya lakukan.

* + - 1. **Output/Hasil**

**S**urat Izin, yang berisikan permohonan izin, rencana kegiatan dan jadwal kegiatan. Sedangkan hal-hal yang bersifat tentatif akan dibicarakan secara langsung kepada user.

* + - 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* + - 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Pada tahapan ini memberikan penguatan kepada nilai BPKP yaitu Profesional dan Orientasi Pengguna. Karena dengan membuat surat izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan adalah salah satu ciri seorang profesional. Dan kegiatan ini harus dilakukan semata-mata berorientasi pengguna untuk tercapainya kepuasan pengguna.

1. **Observasi Infrastruktur dan Keadaan Aset IT saat ini.**
   1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam observasi infrastruktur dan aset IT dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan pembicaraan atau interview untuk memberikan **kejelasan target** (Akuntabilitas) kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Wawancara juga diperlukan untuk melakukan **musyawarah** (Nasionalisme) tentang hal-hal yang berkaitan selama aktualisasi. Selama bermusyawarah, saya akan menunjukkan sikap **profesional** (Etika Publik) untuk menunjukkan bahwa saya bekerja dengan **berorientasi dengan mutu** (Komitmen Mutu) agar tercipta kepercayaan dari pihak pengelola. Langkah berikutnya adalah meminta dokumen yang berkaitan dengan Infrastruktur dan Aset IT saat ini, kemudian melakukan observasi langsung kepada Infrastruktur dan aset IT aset saat ini secara fisik/langsung. Selama melakukan observasi pada melalui dokumen dan langsung terhadap Infrastruktur dan Aset IT saat ini saya akan melakukannya dengan **kerja keras** (Anti Korupsi) sehingga hasilnya dapat maksimal.Langkah selanjutnya adalah melakukan pendataan terhadap Infrastruktur dan Aset IT yang ada saat ini.

* 1. **Output/Hasil**

Dokumen Infrastruktur dan Aset IT Sebelum Aktualisasi, yang berisikan data-data terkait IT yang ada sebelum dilakukannya Aktualisasi yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding di akhir kegiatan.

* 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Nilai Organisasi yang terkandung dalam kegiatan ini adalah Profesional dan Orientasi Pengguna. Karena dalam melakukan observasi infrastruktur dan Aset IT harus berdasarkan keahlian dan keilmuan yang sesuai.

1. **Identifikasi Permasalahan yang ada saat ini mengenai Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik.**
   1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam identifikasi permasalahan infrastruktur dan aset IT dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya.

Pada kegiatan ini dalam melakukan identifikasi harus berdasarkan **keseimbangan** (Akuntabilitas) antara apa yang ada saat ini dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh satgas forensik komputer. Dalam melakukan proses identifikasi harus dilakukan secara **disiplin** (Nasionalisme) dan **transparan** (Etika publik) tanpa ada yang disembunyikan semata-mata untuk selalu **melakukan perbaikan mutu** (Komitmen Mutu). Proses identifikasi juga harus dilakukan dengan **berani** (Anti Korupsi) menunjukkkan bila ditemukan sebuah permasalahan.

* 1. **Output/Hasil**

Dokumen Analisis Permasalahan Infrastruktur dan Aset IT, yang berisikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama proses identifikasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tentunya harus berdasarkan analisis dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

* 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Kegiatan ini mengandung penguatan nilai Profesional dan Responsible dari nilai yang dimiliki BPKP.Kegiatan identifikasi permasalahan harus dilakukan secara profesional, yaitu harus memiliki prinsip keilmuan dan keahlian yang sesuai. Dimana hasil identifikasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan (Responsible).

1. **Melakukan pembenahan atas permasalahan yang ditemukan pada kegiatan nomor 3.**
   * 1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan pembenahan permasalahanT dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya.

Tahapan pertama yang saya lakukan dalam kegiatan ini adalah melaporkan kepada pengelola mengenai permasalahan yang ditemukan. Dalam melaporkan permasalan tersebut haruslah **berintegritas** (Akuntabilitas) yaitu apa yang ditemukan itulah yang dilaporkan. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan pembenahan masalah yang dapat dilakukan dalam diskusi tersebut harus menghormati **keputusan bersama** (Nasionalisme) yang nantinya akan diambil. Dalam membuat keputusan haruslah berdasarkan prinsip **keahlian** (Etika Publik) sehingga nantinya keputusan yang diambil dapat **Efektif dan efisien dalam pengerjaannya** (Komitmen Mutu). Langkah berikutnya adalah melakukan pembenahan untuk mengatasi masalah yang ditemukan, selama melakukan proses pembenahan haruslah **disiplin** (Anti Korupsi) untuk memastikan pembenahan dilakukan dengan baik dan benar.

* + 1. **Output/Hasil**

Kertas kerja Pemecahan Masalah, berisi kegiatan yang dilakukan untuk pembenahan atas permasalahan yang ditemukan.

* + 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan ini adalah Profesional dan Responsible. Karena dalam melakukan pembenahan permasalahan dibutuhkan Profesionalisme dalam pengerjaannya sehingga pembenahan yang dilakukan tepat sasaran dan efisien. Dalam melakukan pembenahan permasalahan juga dituntut harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik dan tidak dilakukan dengan sembarangan.

1. **Membuat dokumentasi keadaan Infrastruktur dan Aset IT saat ini.**
   * 1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam membuat dokumentasi infrastruktur dan aset IT setelah dilakukan pembenahan dibutuhkan kompetensi dan integritas dalam melakukannya.

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah membuat list Infrastruktur dan Aset IT setelah pembenahan, dalam menyusun list saya akan **jujur** (Akuntabilitas) dan **amanah** (Nasionalisme) sesuai dengan apa yang memang dikerjakan. Langkah Selanjutnya adalah membuat dokumen dokumentasi Infrastruktur dan Aset IT setelah pembenahan, dokumen ini dibuat untuk **mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja di depan publik** (Etika Publik) dan sebagai acuan dari upaya **menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan** (Komitmen Mutu). Di dalam dokumen ini tertuang semua bentuk **tanggung jawab** (Anti Korupsi) saya selama melakukan kegiatan pembenahan.

* + 1. **Output/Hasil**

Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen Infrastruktur dan Aset IT setelah pembenahan. Dokumen berisi tentang list pembenahan yang sudah dilakukan dan analisis penyebab terjadinya masalah.

* + 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Pada kegiatan ini penguatan nilai organisasinya adalah integritas. Karena dalam membuat dokumen setelah pembenahan dituntut integritas yang mengharuskan kita melaporkan semua yang benar-benar dikerjakan saja, sesuai fakta yang ada.

1. **Membuat SOP pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT saat ini.**
   * 1. **Tahapan Kegiatan dan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah Manajemen ASN, dikarenakan dalam membuat SOP pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT dibutuhkan kompetensi, independensi dan netralitas dalam melakukannya.

Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah melaporkan hasil dari kegiatan point 5 ke pengelola. Dokumen yang dilaporkan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendiskusikan dengan pengelola terkait pembuatan SOP yang tepat untuk mencegah permasalahan kembali terjadi. Tujuan diskusi sebelum pembuatan SOP adalah untuk menampung semua ide dan pemikiran sehingga tercipta SOP yang **berkeadilan** (Akuntabilitas) dan mengakomodir **kepentingan bersama** (Nasionalisme). Setelah diskusi mencapai kesepakatan barulah SOP akan dibuat. Diharapkan dengan adanya SOP yang tepat akan mendorong **kesetaraan dalam pekerjaan** (Etika Publik) setiap pegawai yang ada. SOP yang dibuat, haruslah dapat menampung **inovasi** (Komitmen Mutu). Hal yang paling penting adalah setiap pegawai yang ada harus **peduli** (Anti Korupsi) terhadap SOP yang dibuat, karena sebaik apapun SOP yang dibuat akan percuma bila tidak ada kepedulian bersama.

* + 1. **Output/Hasil**

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya SOP Pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT.

* + 1. **Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi**

Kegiatan ini mendukung visi “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan misi ”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. Hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Komputer yang sifatnya adalah sebagai pendukung di BPKP. Sehingga kegiatan ini mendukung visi BPKP melalui peran dalam memberikan dukungan untuk membentuk korporasi yang bersih dan efektif.

* 1. **Penguatan Nilai Organisasi**

Penguatan nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan ini adalah Profesional dan Orientasi Pengguna. Pembuatan SOP bertujuan untuk mendorong para pegawai untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan melakukan tugasnya sesuai alur yang baik dan benar.

1. **Penjadwalan Kegiatan**

### **Penjadwalan**

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi dilakukan sesuai jadwal kegiatan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4** Jadwal pelaksanaan aktualisasi dan habituasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Maret | | | | | April | | | | Mei | | | | | Juni | | | | Juli | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Menghubungi Pengelola (Pihak terkait) Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Observasi Infrastruktur dan Keadaan Aset IT saat ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Identifikasi Permasalahan yang ada saat ini mengenai Infrastruktur dan Aset IT di Satgas Komputer Forensik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Melakukan pembenahan atas permasalahan yang ditemukan pada kegiatan nomor 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Membuat dokumentasi keadaan Infrastruktur dan Aset IT Setelah Pembenahan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Membuat SOP pengelolaan Infrastruktur dan Aset IT saat ini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bimbingan dengan Mentor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bimbingan dengan Coach / Pembimbing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **BAB III**

# **PENUTUP**

Isu yang menjadi pembahasan saya adalah kurang optimalnya pengelolaan infrastruktur dan aset IT di satgas komputer forensik di Deputi Bidang Investigasi, BPKP Pusat. Sehingga dapat menghambat kinerja satgas komputer forensik yang bisa bermuara terhambatnya kinerja Deputi Bidang Investigasi. Hambatan yang dimaksud adalah implementasi Infrastruktur dan Aset IT yang tidak terdokumentasi sehingga menyulitkan saat ada Troubleshooting dan upgrading spesifikasi Aset yang ada.

Pemecahan isu, yaitu berupa Pembenahan Infrastruktur Jaringan dan Pembuatan SOP dan berbagai kegiatan yang mendukung penyelesaian masalah tersebut, saya menerapkan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dengan pendekatan Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik sesuai dengan fungsi Asn sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

Rancangan aktualisasi ini akan dilakukan 80 hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2018 - 18 Juli 2018 di Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Akuntabilitas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Anti Korupsi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Etika Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Komitmen Mutu*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III tentang Nasionalisme*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Habituasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017*. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS tentang Whole of Goverment.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.